

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

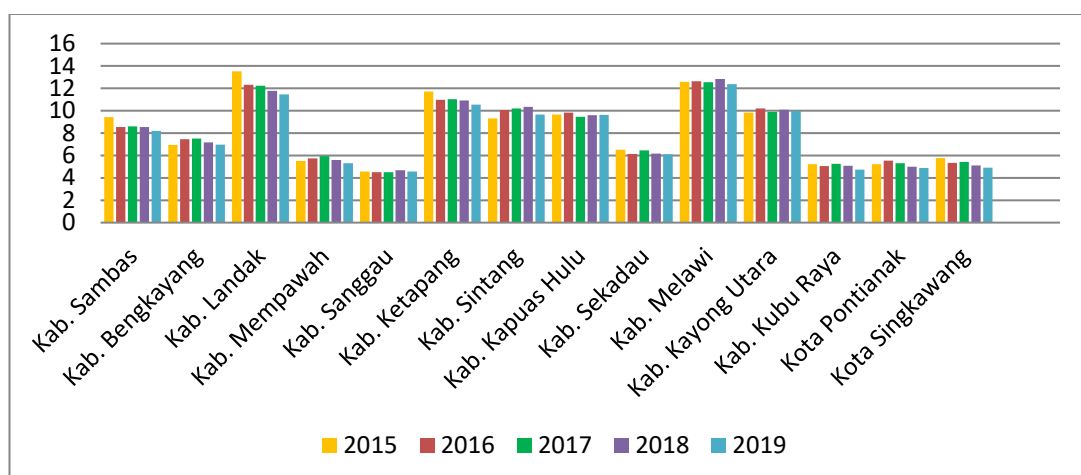
Indonesia mempunyai bermacam persoalan ekonomi salah satunya adalah kemiskinan yang terjadi diseluruh wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang berbeda. Masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang selalu dikaji secara terus menerus karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dalam lingkup ekonomi tetapi juga dalam lingkup sosial. Akibatnya, kemiskinan menjadi kewajiban bersama untuk dicari jalan keluarnya dengan memanfaatkan tahapan-tahapan yang efisien. Pemerintah daerah harus menjadikan kemiskinan sebagai persoalan mendasar untuk ditangani agar permasalahan kemiskinan tidak semakin besar (Yacoub, 2012).

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kurangnya pendapatan dan konsumsi. Selain itu juga dikaitkan dengan masalah lainnya seperti tingkat pendidikan yang rendah, ketidakberdayaan berpartisipasi dalam pembangunan dan isu-isu yang berbeda terkait dengan pembangunan manusia (Suhandi, et al., 2018). Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat yang menyebabkan semakin tingginya persaingan untuk memperoleh pekerjaan karena pemerintah kesulitan untuk menambah lapangan pekerjaan, sehingga hanya penduduk dengan kualitas yang dianggap lebih baik yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh yang akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan baru terutama pekerjaan disektor formal.

Kemiskinan juga dikaitkan dengan faktor gender (Fikri dan Suparyati, 2017). Selama ini isu gender mengenai disparitas antar masyarakat laki-laki dan perempuan masih tergolong wajar sehingga dapat terjadi perbedaan antara jumlah pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Sehingga seringkali kemiskinan

dikaitkan dengan perempuan sebagai korban dari kemiskinan. Apabila standar hidup layak penduduk miskin di Negara berkembang dibandingkan maka terlihat bahwa kaum perempuan dan anak-anaklah yang paling menderita (Mulasari, 2015).

Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya kesempatan perempuan untuk mengembangkan diri karena adanya diskriminasi dibidang pendidikan dan kesehatan, menurut Todaro dan Smith (2011) dalam penelitian dikebanyakan Negara berkembang perempuan muda menerima pendidikan yang lebih sedikit daripada laki-laki. Penyebab lainnya dikarenakan rendahnya kesempatan yang dimiliki perempuan untuk memiliki pendapatan sendiri karena masih adanya anggapan bahwa perempuan hanya boleh menjadi ibu rumah tangga. Alhasil perempuan umumnya akan menghadapi hambatan besar dalam memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang setara dibidang pekerjaan (*Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*, 2016). Namun, menurut beberapa kajian yang telah banyak dilakukan menyatakan bahwa sebenarnya perempuan adalah *agent of development* sebagai asset bangsa yang peranannya sangat dibutuhkan di dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu peran gender perempuan dibidang pendidikan dan ekonomi adalah salah satu indikator untuk meningkatkan indeks pembangunan (Padang, et.al, 2019).

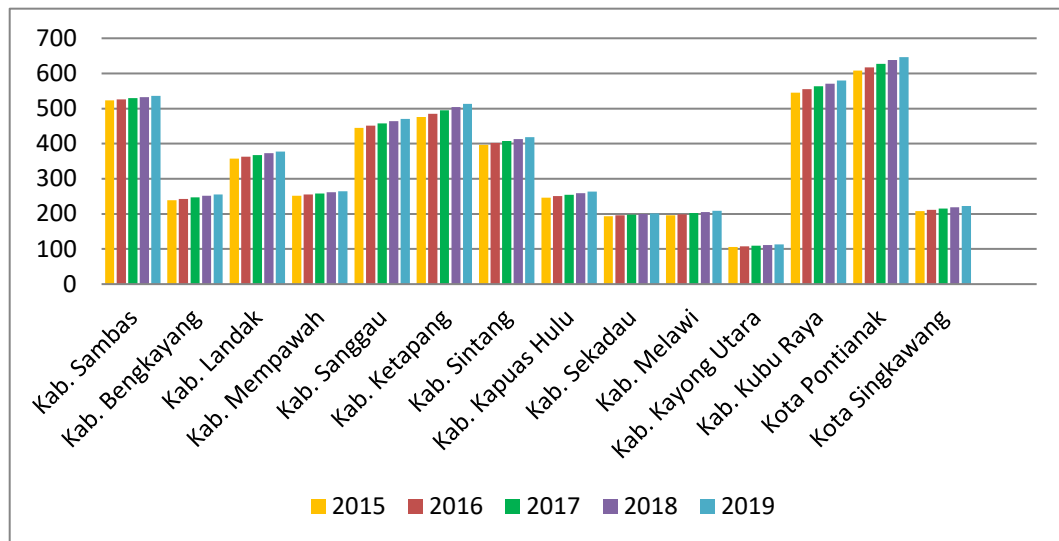


Gambar 1. 1 Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Persen) (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat)

Gambar 1.1. menunjukkan bahwa penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat cenderung mengalami penurunan. Daerah dengan peningkatan penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Landak sebesar 13.51 persen pada tahun 2015 dan terendah di Kabupaten Sanggau pada tahun 2016 sebesar 4.51 persen. Meskipun persentase kemiskinannya cenderung mengalami penurunan tetapi masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki persentase di atas 9,41 sebagai persentase penduduk miskin nasional pada tahun 2019, salah satunya adalah Kabupaten Melawi sebesar 12,31 persen. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat merupakan jumlah penduduk miskin tertinggi diantara Provinsi Kalimantan lainnya yaitu sebesar 7,49 persen, angka ini jauh di atas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,98 persen pada waktu yang bersamaan. Selain itu persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat tidak merata, hal ini dapat menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan pendapatan masyarakat.

Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dipisahkan dengan jumlah penduduk (Safuridar dan Damayanti, 2018). Jumlah penduduk sebagai salah satu unsur yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan merupakan unsur yang strategis dalam pembangunan karena pertumbuhan penduduk merupakan unsur yang memengaruhi usaha kemajuan yang dilakukan oleh otoritas publik. Penduduk dapat menjadi masalah bagi otoritas publik jika tidak dapat dikendalikan, karena jika jumlah penduduk bertambah dengan cepat maka dapat menyebabkan angka kemiskinan ikut meningkat (Agustina, et, al. 2018). Jumlah penduduk di Kalimantan Barat antara laki-laki dan perempuan tidaklah jauh berbeda, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki di Kalimantan Barat sebesar 2.578.128 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 2.490.999 jiwa. Dalam penelitian ini, untuk melihat peranan perempuan dalam mengatasi kemiskinan maka dilihat seberapa besar peran penduduk perempuan di dalam bidang pendidikan dan juga tingkat partisipasi angkatan kerja serta indeks pemberdayaan gender sebagai indikator peran perempuan dalam masalah ekonomi

dan legislatif, karena perempuan memiliki peran transisi sebagai tenaga kerja yang secara aktif terkait dengan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan uang dalam latihan yang berbeda sesuai sekolah mereka (Wibowo, 2011).



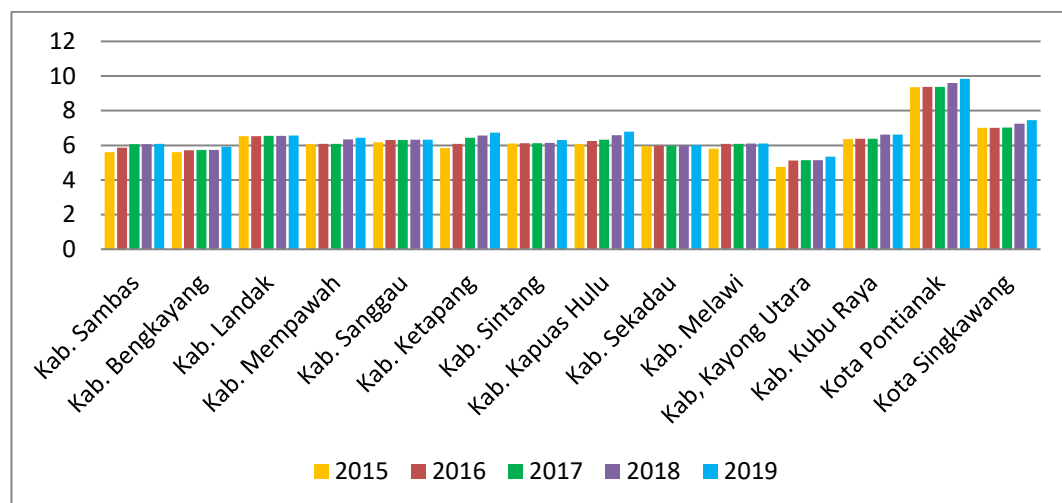
Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Jiwa) (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat)

Gambar 1.2 menunjukkan jumlah penduduk cenderung meningkat, Kabupaten Kayong Utara memiliki jumlah penduduk terendah pada tahun 2015 sebesar 105.477 jiwa dan Kota Pontianak memiliki jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2019 sebesar 646.661 jiwa. Hal ini dikarenakan selain tingkat kelahiran yang tinggi, tingkat urbanisasi di Kota Pontianak juga tergolong tinggi karena merupakan ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Barat sehingga banyak warga daerah yang berusaha mencari pekerjaan di Kota Pontianak.

Cara untuk meningkatkan peran perempuan dalam memperbaiki kondisi kehidupan orang-orang yang tergolong miskin adalah dengan cara melibatkan perempuan dalam arus utama perekonomian yang mencakup mempertinggi tingkat pendidikan (Amory, 2019). Pendidikan dapat menjadi salah satu modal yang dimiliki manusia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah satu bentuk kualitas sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu faktor kemiskinan.

Seperti apa yang disampaikan Nurkse dalam teori kemiskinannya yang disebut teori lingkaran setan kemiskinan yang menyatakan bahwa kurangnya modal merupakan salah satu penyebab rendahnya produktifitas yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat tabungan dan investasi. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan formal. Pendidikan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki informasi, keterampilan, serta memiliki inovasi. Selain itu pendidikan juga mampu membantu masyarakat mendapatkan pendapatan dengan ikut aktif dalam perekonomian (Subroto, 2014). Terdapat anggapan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan khususnya disektor formal dengan pendapatan yang tinggi maka prospeknya lebih baik bagi seorang pelamar yang telah menyelesaikan pelajarannya melalui pendidikan formal, baik itu pendidikan menengah dan tinggi (Kuncoro, 2000).

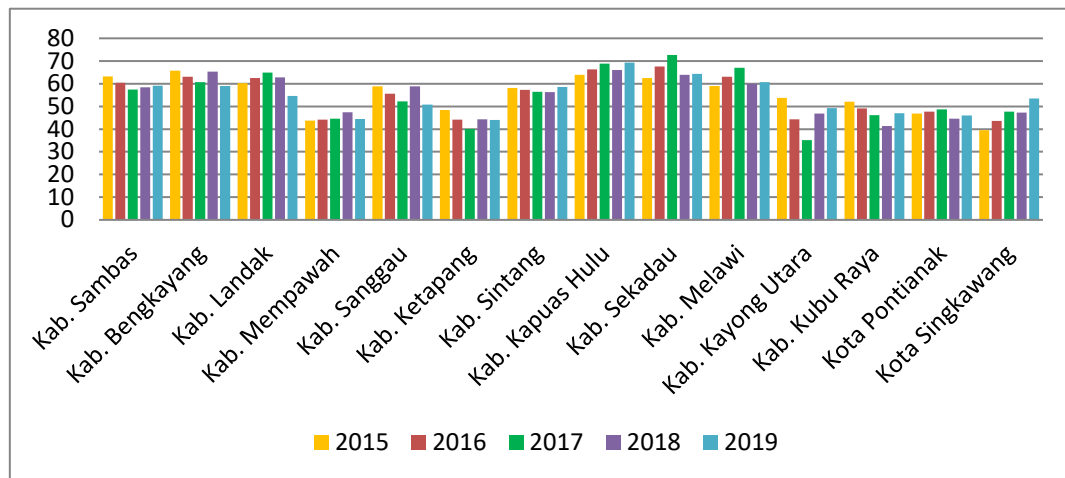
Peningkatan peran perempuan dalam persediaan modal manusia berupa pendidikan dan kesehatan mempengaruhi pemberdayaan politik dan ekonomi penduduk perempuan yang mengakibatkan Negara dapat menggunakan sumber daya manusia perempuan lebih efisien sehingga penggunaan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Nazmi & Jamal, 2018).



Gambar 1. 3 Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Tahun) (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat)

Pada penelitian ini tingkat pendidikan yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah perempuan untuk mengetahui tingkat pencapaian penduduk perempuan dalam menempuh pendidikan formal. Gambar 1.3 menunjukkan bahwa dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat hanya Kota Pontianak yang memiliki rata-rata lama sekolah perempuan diatas 9 tahun atau tamat SMP. Pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah perempuan di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,79 tahun yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk perempuan Provinsi Kalimantan Barat belum menamatkan sekolah hingga SMP. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Pontianak pada tahun 2019 sebesar 9.84 tahun dan terendah di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2015 sebesar 4.75 tahun.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu strategi penting untuk membangun kerja perempuan dalam mengembangkan potensinya sehingga lebih mampu mandiri dan salah satu upaya penyetaraan isu gender (Ruslan, 2010). Kesadaran tentang hal yang berkaitan dengan peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Salah satu indikator peran perempuan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dilihat dari indikator ini dapat dilihat bahwa peran perempuan semakin meningkat (Kuncoro, 2000). Investasi perempuan di pasar kerja menunjukkan tingkat bantuan pemerintah dan pekerjaan perempuan karena semakin banyak perempuan yang bekerja semakin banyak perempuan yang benar-benar ingin melengkapi diri untuk hidup mandiri dengan memperoleh gaji sendiri. (*Profil Perempuan Indonesia*, 2019).

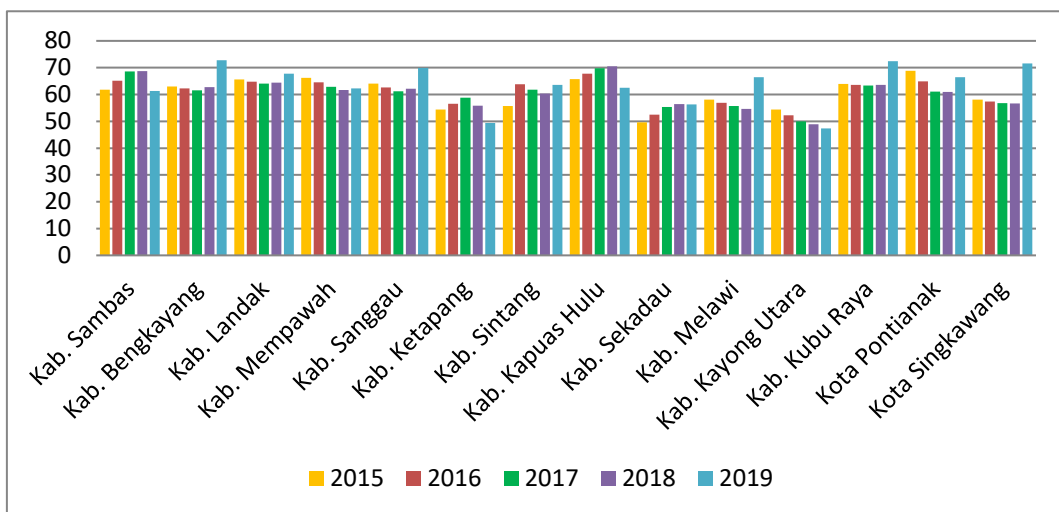


Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Persen) (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa jumlah TPAK perempuan berfluktuasi. Daerah yang memiliki jumlah TPAK perempuan terbesar berada di Kabupaten Sekadau pada tahun 2017 sebesar 72,61 persen dan terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar 35,09 persen di tahun yang sama. TPAK perempuan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 2,06 persen dari tahun 2015 sebesar 54,93 persen menjadi 52,87 persen pada tahun 2019 dan persentase jumlah TPAK perempuan di Kalimantan Barat ini lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki laki. Pada tahun 2019 TPAK laki laki sebesar 83,24 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 52,87 persen. Hal ini berkaitan dengan seberapa besar jumlah angkatan kerja antara laki laki dan perempuan. Jumlah perempuan yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat lebih besar karena pekerjaan mengurus rumah tangga lebih banyak dilakukan perempuan seperti merencanakan dan menyajikan makanan, sangat fokus pada anak-anak, orang sakit, atau orang tua yang terdapat di dalam rumah tangga.

Indikator lain yang menunjukkan peran gender perempuan adalah indeks pemberdayaan gender yang terdiri dari tiga indikator yaitu sumbangan pendapatan perempuan, perempuan yang terlibat dalam parlemen, dan perempuan sebagai tenaga profesional (*Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020*). Indeks

pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan dibidang politik, pengembalian keputusan, dan ekonomi. Penurunan kemiskinan dan keseimbangan gender dari dampak pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi (Arifin, 2018).



Gambar 1. 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Persen) (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa indeks pemberdayaan gender (IDG) berfluktuasi. Daerah dengan IDG tertinggi berada di Kabupaten Bengkayang sebesar 72,80 persen pada tahun 2019 dan daerah dengan IDG terendah berada di Kabupaten Kayong Utara sebesar 47,29 persen pada tahun 2019. Tinggi rendahnya IDG disebabkan oleh ada atau tidaknya peningkatan yang terlihat pada salah satu atau semua indikator IDG.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan keseimbangan gender untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa memisahkan antara laki-laki dan perempuan, dengan cara ini peningkatan gender sangat penting untuk memberikan kesempatan dan hak-haknya sebagai individu agar bisa



berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan sosial.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pernyataan Masalah**

Kemiskinan yang merupakan sebuah masalah ekonomi ini seringkali dikaitkan dengan perempuan yang menjadi korban kemiskinan atau yang menjadi penyumbang angka persentase penduduk miskin. Namun menurut kajian yang telah banyak dilakukan dikatakan bahwa sebenarnya perempuan memiliki sebuah peran yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi yang dimana peranan tersebut dapat dilihat dari pendidikan, tingkat partisipasi dan indeks pemberdayaan gender. Namun kondisi pendidikan perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan tingkat indeks pemberdayaan gender di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tidak menunjukkan peningkatan atau kestabilan. Angka rata-rata lama sekolah perempuan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat berada dikisaran angka 6 yang menandakan bahwa sejumlah penduduk hanya menyelesaikan pendidikan formal hingga tahap SD. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas perempuan dalam keikutsertaan perannya dalam mengatasi kemiskinan.

### **1.2.2 Pertanyaan Masalah**

1. Apakah pendidikan perempuan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat?
2. Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat?
3. Apakah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan perempuan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

##### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

Secara teoritis penelitian yang akan dibuat ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang peran gender perempuan dalam mengatasi kemiskinan melalui pendidikan, ketengakerjaan perempuan dan pemberdayaan perempuan di Kalimantan Barat sesuai dengan teori-teori yang digunakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat khususnya perempuan dengan menumbuhkan kesadaran dalam meningkatkan kualitas perempuan agar dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan.

##### **1.4.2 Kontribusi Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi penelitian lain yang menarik untuk meneliti mengenai peran gender perempuan. Serta diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan mengenai pengaruh peran gender perempuan terhadap kemiskinan di lingkungan sekitar.

#### **1.5. Gambaran Konstektual Penelitian**

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 12 Kabupaten dan Kota dengan Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Pontianak. Lokasi yang diteliti adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat.